

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya merupakan unit pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang kepala, serta terdiri atas sub bagian administrasi umum dan kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional bertugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi KKP. Kelompok jabatan fungsional ini bertugas melaksanakan di instalasi sesuai unit kerja masing-masing. KKP Kelas I Surabaya memiliki 4 bidang kegiatan yaitu Tata Usaha, Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE), Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL), dan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW).
2. Program utama kesehatan KKP Kelas I Surabaya bidang epidemiologi meliputi, pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi (PKSE). Adapun kegiatan dari PKSE sendiri meliputi, pemeriksaan dan penerbitan health certificate OMKABA ekspor; pengawasan kekarantinaan kapal, pesawat udara dan alat transportasi lain; pengangkutan orang sakit / jenazah; pengembangan teknologi; pendidikan dan pelatihan kekarantinaan; SE penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali; jejaring kerja surveilans epidemiologi nasional dan internasional; kesiapsiagaan, pengkajian, advokasi, dan penanggulangan KLB, bencana dan/atau pasca bencana bidang kesehatan.
3. Pelaksanaan sistem surveilans alat angkut sudah dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedure (SOP) sebagai pedoman/acuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsinya. Dalam pelaksanaan surveilans alat angkut biasanya kendala terjadi dalam proses pengumpulan data. Seperti tidak semua maskapai penerbangan memberikan gendec dan manifest kepada KKP Kelas I Surabaya, terutama untuk pesawat Charter/irregular dan Cargo. Sehingga untuk data pesawat tersebut KKP Kelas I Surabaya berkoordinasi dengan PT. Angkasa Pura I untuk pemenuhan data. Kendala lainnya yaitu perbedaan data jumlah kedatangan pesawat dan penumpang penerbangan internasional antara KKP Kelas I Surabaya dengan PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Juanda. Sehingga untuk data surveilans alat angkut KKP Kelas I Surabaya menggunakan data yang berasal dari gendec dan manifest yang diberikan oleh maskapai penerbangan. Kendala-kendala tersebut masih dapat teratasi dengan adanya solusi yang ada sehingga pelaksanaannya dapat tetap berjalan.

4. Selama melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa turut berpartisipasi dalam proses penerbitan *health certificate* OMKABA (Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif), Pengawasan termal di terminal 1 dan 2 bandara Juanda, penginputan data kedatangan dan keberangkatan pesawat pada *website* SINKARKES, sosialisasi dan *helpdesk* pelayanan penerbitan *health certificate* secara online, serta kegiatan diseminasi informasi penyusunan rencana kontigensi KKP Kelas I Surabaya.

5.2 Saran

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan surveilans maupun kegiatan pelayanan di KKP telah sesuai dengan SOP yang berlaku, namun menurut pengamatan di lapangan terdapat beberapa hal yang masih perlu di-*upgrade* seperti, sistem pencatatan dan perekapan data yang masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan di KKP diharapkan dapat lebih efisien.
2. Pengawasan kedatangan penumpang di terminal 1 dan 2 Bandara Juanda juga dirasa masih cukup longgar. Oleh sebab itu, diharapkan pengawasan kedatangan penumpang lebih diperketat serta diperkuat menggunakan SOP, sehingga dapat lebih efektif dalam melakukan upaya pencegahan penyakit PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*)